



Analisis Kelembagaan Terhadap Model Pembangunan Koperasi Berbasis Negara

Supriyono

Universitas Bakti Indonesia

Alamat: Jl. Kampus Bumi Cempokosari No. 40, Dusun Cempokasari, Desa Sarimulyo,
Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

Email: supriyono@ubibanyuwangi.ac.id*

Abstract. *Cooperative development in Indonesia has largely followed a state-based model aimed at strengthening the people's economy. However, many cooperatives established through state intervention exhibit weak institutional capacity and limited sustainability. This study aims to critically analyze the state-based cooperative development model from an institutional perspective. A qualitative approach with an interpretive case study design was employed. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, and analyzed thematically using institutional theory and elite theory. The findings indicate that strong state dominance produces administratively driven cooperatives characterized by low member participation, high dependence on government assistance, and vulnerability to local power relations. These results reveal a paradox in state-based cooperative development. The study concludes that strengthening cooperatives requires a shift in the role of the state from dominant controller to institutional facilitator that promotes autonomy and internal democratic governance.*

Keywords: *cooperatives, institutions, participation, state-based development*

Abstrak. Pembangunan koperasi di Indonesia banyak dilakukan melalui model berbasis negara dengan tujuan memperkuat ekonomi rakyat. Namun, berbagai koperasi yang dibentuk melalui intervensi negara menunjukkan kelemahan kelembagaan dan rendahnya keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis model pembangunan koperasi berbasis negara dari perspektif kelembagaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus interpretatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik menggunakan perspektif teori kelembagaan dan teori elite. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi negara membentuk koperasi yang bersifat administratif, dengan partisipasi anggota yang rendah, ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah, serta rentan terhadap relasi kekuasaan lokal. Temuan ini menegaskan adanya paradoks pembangunan koperasi berbasis negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan koperasi memerlukan pergeseran peran negara dari aktor dominan menjadi fasilitator kelembagaan yang mendorong kemandirian dan demokrasi internal koperasi.

Kata kunci: koperasi, institusi, partisipasi, pembangunan berbasis negara

LATAR BELAKANG

Koperasi sejak lama diposisikan sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam konstitusi Indonesia, koperasi ditegaskan sebagai sokoguru perekonomian yang berlandaskan asas

Received: January 10, 2026; Revised: January 15, 2026; Accepted: January 21, 2026;

Published June 30, 2026.

* Corresponding author, e-mail address

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33. Penegasan normatif tersebut menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya dipahami sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan (Suardi, 2025). Dengan demikian, pembangunan koperasi memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan politik yang tidak terpisahkan dari peran negara dalam mengarahkan pembangunan nasional. Dalam praktiknya, pembangunan koperasi di Indonesia banyak dilakukan melalui model pembangunan koperasi berbasis negara (*state-based cooperative development*), yang ditandai oleh peran dominan pemerintah dalam proses pendirian, pembinaan, pembiayaan, hingga pengawasan koperasi (Chalim, Listyowati, Hanim, & Noorman, 2022). Negara berfungsi sebagai aktor sentral yang menentukan tujuan, struktur organisasi, serta mekanisme operasional koperasi (Ruslan, 2018). Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa koperasi memerlukan dukungan negara agar mampu tumbuh dan bertahan dalam sistem ekonomi pasar yang kompetitif. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa dominasi negara dalam pembangunan koperasi justru sering melahirkan koperasi yang bersifat administratif, bergantung pada bantuan pemerintah, dan lemah dalam partisipasi anggota (Aprilis & Zulkarnain, 2025; Ginda, 2020; Syafi'i & Septiawati, 2025).

Fenomena tersebut tercermin dari tingginya jumlah koperasi tidak aktif, rendahnya tingkat kehadiran anggota dalam rapat anggota tahunan, serta minimnya kontribusi koperasi terhadap peningkatan kesejahteraan anggota. Data Kementerian Koperasi dan UKM (2021) menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi secara formal terdaftar, namun tidak berfungsi secara optimal sebagai organisasi ekonomi berbasis anggota. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan koperasi tidak semata-mata berkaitan dengan kapasitas manajerial atau keterbatasan modal, melainkan berakar pada persoalan struktural dan kelembagaan yang melekat pada model pembangunan koperasi berbasis negara (Septiana, 2025).

Dari perspektif teori kelembagaan, kegagalan tersebut dapat dipahami sebagai konsekuensi dari konfigurasi institusi yang tidak selaras dengan prinsip dasar koperasi. North dalam (Nurfadilah, Yakub, & Nadir, 2024; Wardanni, Mazmura, Fahira, & Amalia, 2025) menegaskan bahwa institusi baik formal maupun informal membentuk

pola perilaku dan interaksi aktor. Dalam konteks koperasi berbasis negara, aturan formal yang ditetapkan pemerintah sering kali tidak diimbangi dengan norma, nilai, dan insentif yang mendorong partisipasi anggota secara sukarela (Hayati, 2025). Akibatnya, koperasi kehilangan karakter sebagai organisasi ekonomi berbasis anggota dan cenderung bertransformasi menjadi perpanjangan tangan birokrasi negara, dengan orientasi kepatuhan administratif yang lebih kuat dibandingkan keberlanjutan ekonomi dan sosial (Hendra & Halbadika Fahlevi, 2024). Selain persoalan kelembagaan, pembangunan koperasi berbasis negara juga rentan terhadap bias politik dan kepentingan elite. Perspektif teori elite menjelaskan bahwa intervensi negara dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor tertentu untuk mengontrol sumber daya koperasi demi kepentingan politik atau birokratis (Hamid, 2020). Dalam situasi ini, koperasi tidak lagi berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, melainkan sebagai instrumen legitimasi kebijakan dan distribusi rente. Hal ini memperkuat argumen bahwa permasalahan koperasi tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan yang membentuk dan mengendalikan institusi koperasi (Farid, 2025).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian koperasi di Indonesia masih berfokus pada aspek kinerja keuangan, tata kelola internal, atau evaluasi efektivitas program pemerintah. Kajian yang menempatkan koperasi sebagai institusi sosial-politik dan menganalisis secara mendalam peran negara dalam membentuk struktur, aturan, dan praktik koperasi masih relatif terbatas (Sabila & Toruan, 2024). Dengan kata lain, terdapat celah penelitian (*research gap*) dalam memahami pembangunan koperasi berbasis negara sebagai sebuah konstruksi kelembagaan yang dipengaruhi oleh interaksi antara aturan formal, norma informal, dan relasi kekuasaan. Keterbatasan pemahaman ini berpotensi menyebabkan kebijakan pembangunan koperasi terus mengulang pola yang sama tanpa menyentuh akar permasalahan kelembagaan. Urgensi penelitian ini semakin menguat dalam konteks reformasi kebijakan koperasi yang terus didorong oleh pemerintah sebagai bagian dari agenda penguatan ekonomi rakyat dan inklusi ekonomi. Tanpa analisis kelembagaan yang komprehensif, kebijakan pembangunan koperasi berisiko hanya menekankan aspek administratif dan kuantitatif, seperti jumlah koperasi atau akses terhadap bantuan, tanpa memperhatikan kualitas institusi koperasi itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu mengungkap bagaimana peran negara membentuk dinamika kelembagaan koperasi serta implikasinya terhadap keberlanjutan dan

kemandirian koperasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menawarkan pendekatan kelembagaan dengan menempatkan negara sebagai aktor institusional utama yang membentuk aturan main, struktur insentif, dan relasi kekuasaan dalam koperasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya menggali makna, praktik, dan relasi antaraktor dalam pembangunan koperasi berbasis negara secara lebih mendalam. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih kritis terhadap paradoks pembangunan koperasi berbasis negara, yaitu antara tujuan pemberdayaan ekonomi dan praktik kontrol birokratis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis model pembangunan koperasi berbasis negara dari perspektif kelembagaan, dengan fokus pada bagaimana peran negara membentuk struktur, aturan, dan praktik koperasi, serta bagaimana konfigurasi kelembagaan tersebut memengaruhi keberlanjutan dan kemandirian koperasi. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian koperasi melalui penguatan perspektif kelembagaan dalam konteks negara berkembang. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan pembangunan koperasi yang lebih berorientasi pada penguatan kemandirian kelembagaan, partisipasi anggota, dan pembatasan dominasi negara dalam praktik koperasi.

KAJIAN TEORITIS

Pembangunan Koperasi Berbasis Negara

Pembangunan koperasi di negara berkembang umumnya dilakukan melalui model pembangunan koperasi berbasis negara, yang ditandai oleh peran dominan pemerintah dalam pendirian, pembinaan, pembiayaan, dan pengawasan koperasi (Simorangkir, Sinaga, & Setyowati, 2025). Negara diposisikan sebagai aktor utama yang mengarahkan tujuan dan struktur koperasi dengan asumsi bahwa dukungan negara diperlukan untuk memperkuat ekonomi rakyat. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa dominasi negara cenderung menghasilkan koperasi yang bersifat administratif, bergantung pada bantuan pemerintah, dan lemah dalam partisipasi anggota. Kondisi ini menimbulkan

paradoks antara tujuan pemberdayaan dan praktik kontrol birokratis dalam pembangunan koperasi.

Teori Kelembagaan dan Dinamika Koperasi

Dalam perspektif teori kelembagaan, institusi dipahami sebagai seperangkat aturan formal dan norma informal yang membentuk perilaku aktor. Pada koperasi berbasis negara, aturan formal yang ditetapkan pemerintah sering kali tidak sejalan dengan norma dan insentif yang mendorong partisipasi anggota (Yuhertiana, Zakaria, Suhartini, & Sukiswo, 2022). Ketidaksinkronan ini menyebabkan koperasi berfungsi secara administratif, tetapi tidak berkelanjutan secara ekonomi dan sosial. Dengan demikian, persoalan koperasi tidak hanya berkaitan dengan kapasitas manajerial, melainkan juga dengan desain kelembagaan yang membatasi kemandirian dan partisipasi anggota.

Koperasi, Partisipasi Anggota dan Relasi Kekuasaan

Koperasi secara normatif merupakan organisasi ekonomi berbasis anggota yang dikelola secara demokratis. Keberlanjutan koperasi sangat bergantung pada partisipasi dan rasa memiliki anggota. Dalam konteks koperasi berbasis negara, intervensi pemerintah yang kuat berpotensi menggerus otonomi koperasi dan memusatkan pengambilan keputusan pada elite birokrasi atau pengurus (Sabila & Toruan, 2024). Relasi kekuasaan yang timpang ini membuka ruang terjadinya penguasaan koperasi oleh kelompok tertentu, sehingga koperasi lebih berfungsi sebagai instrumen kebijakan daripada sebagai alat pemberdayaan ekonomi anggota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus interpretatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk mengukur kinerja koperasi secara kuantitatif, melainkan untuk memahami secara mendalam dinamika kelembagaan, relasi aktor, serta makna praktik pembangunan koperasi berbasis negara dalam konteks sosial-politik tertentu. Studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi pembangunan koperasi sebagai fenomena institusional yang kompleks dan kontekstual, di mana batas antara kebijakan, struktur organisasi, dan praktik sosial saling beririsan. Desain interpretatif digunakan dengan asumsi ontologis bahwa realitas

kelembagaan koperasi bersifat sosial-konstruktif dan dibentuk melalui interaksi antara aktor negara, pengurus koperasi, dan anggota. Oleh karena itu, pemahaman terhadap model pembangunan koperasi berbasis negara diperoleh melalui penafsiran atas pengalaman, persepsi, dan praktik para aktor yang terlibat.

Fokus penelitian ini adalah kelembagaan koperasi dalam konteks pembangunan berbasis negara, yang dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu: (1) aturan formal, meliputi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah terkait koperasi; (2) struktur organisasi, mencakup relasi kewenangan antara negara, pengurus, dan anggota koperasi; dan (3) norma serta praktik informal, seperti pola partisipasi anggota, budaya organisasi, dan tingkat ketergantungan koperasi terhadap negara. Unit analisis dalam penelitian ini adalah koperasi yang dibentuk atau dibina secara intensif oleh negara melalui program pembangunan tertentu. Pemilihan unit analisis tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa koperasi semacam ini merepresentasikan model pembangunan koperasi berbasis negara secara empiris. Penekanan pada unit analisis kelembagaan sejalan dengan perspektif teori institusional yang memandang organisasi sebagai arena interaksi antara aturan formal dan informal.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara purposif terhadap aktor-aktor kunci yang terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan koperasi, meliputi pejabat pemerintah terkait, pengurus koperasi, dan anggota koperasi. Observasi dilakukan untuk memahami praktik organisasi dan interaksi antaraktor dalam kegiatan koperasi. Studi dokumentasi mencakup analisis terhadap kebijakan, regulasi, laporan koperasi, dan dokumen program pemerintah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan bersifat iteratif, dimulai dengan proses reduksi data, pengkodean, dan kategorisasi tematik. Data yang diperoleh diinterpretasikan dengan menggunakan kerangka teori kelembagaan untuk mengidentifikasi pola hubungan antara peran negara, desain kelembagaan, dan praktik koperasi. Proses analisis dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data untuk memungkinkan pendalaman dan klarifikasi temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dominasi Negara dalam Pembentukan Struktur Kelembagaan Koperasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan koperasi berbasis negara ditandai oleh dominasi kuat pemerintah dalam hampir seluruh aspek kelembagaan koperasi, mulai dari proses pendirian, penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pemilihan pengurus, hingga penentuan program usaha. Peran negara tidak terbatas pada fungsi fasilitatif, melainkan bersifat direktif dan dalam beberapa aspek cenderung koersif, terutama melalui regulasi dan skema bantuan yang mengikat koperasi secara administratif. Dominasi tersebut menyebabkan koperasi lebih berfungsi sebagai instrumen implementasi kebijakan publik dibandingkan sebagai organisasi ekonomi berbasis anggota. Hal yang sama juga disampaikan oleh (Giawa & Sihotang, 2025) bahwa koperasi cenderung diposisikan sebagai sarana implementasi kebijakan negara, bukan sebagai entitas ekonomi yang berorientasi pada keanggotaan. Struktur kelembagaan yang terbentuk merefleksikan logika birokrasi negara, di mana kepatuhan administratif menjadi prioritas utama, sementara inisiatif dan kebutuhan anggota berada pada posisi subordinat. Dari perspektif teori kelembagaan, kondisi ini menunjukkan bahwa institusi formal yang dirancang secara top-down tanpa mempertimbangkan norma dan insentif informal berpotensi menghasilkan organisasi yang lemah secara fungsional dan kehilangan daya adaptifnya (Ojea, Lester, & Salgueiro-Otero, 2020). Dengan demikian, kegagalan koperasi tidak dapat dilepaskan dari desain kelembagaan yang dibentuk oleh negara.

Lemahnya Partisipasi Anggota dan Distorsi Demokrasi Koperasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan koperasi relatif rendah. Rapat anggota tahunan cenderung berlangsung sebagai formalitas administratif, sementara keputusan strategis telah ditentukan sebelumnya oleh pengurus yang memiliki relasi dekat dengan aparat pemerintah. Dalam praktiknya, anggota lebih memosisikan diri sebagai penerima manfaat program negara daripada sebagai pemilik dan pengendali koperasi. Kondisi ini mencerminkan terjadinya distorsi terhadap prinsip demokrasi koperasi yang secara normatif menempatkan anggota sebagai aktor utama. Secara kelembagaan, lemahnya partisipasi anggota menunjukkan kegagalan internalisasi nilai dan norma koperasi dalam praktik organisasi. Sutiani, Harahap, &

Damanik (2025) menegaskan bahwa keberlanjutan institusi kolektif sangat bergantung pada tingkat partisipasi dan rasa memiliki aktor. Namun, dalam koperasi berbasis negara, insentif untuk berpartisipasi secara sukarela justru tereduksi oleh dominasi negara yang menggantikan peran anggota dalam pengambilan keputusan strategis.

Ketergantungan Struktural terhadap Bantuan Negara

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa koperasi yang dibangun melalui pendekatan berbasis negara mengalami ketergantungan struktural yang tinggi terhadap bantuan pemerintah, baik dalam bentuk permodalan, program usaha, maupun legitimasi kelembagaan. Ketika dukungan negara berkurang atau dihentikan, aktivitas koperasi cenderung melemah dan dalam beberapa kasus berhenti beroperasi. Ketergantungan ini membentuk pola kelembagaan yang rapuh dan tidak berkelanjutan. Koperasi tidak terdorong untuk mengembangkan kapasitas internal, inovasi usaha, maupun strategi kemandirian ekonomi karena keberlangsungan organisasi sangat bergantung pada siklus program pemerintah. Temuan ini sejalan dengan kritik terhadap model pembangunan koperasi yang bersifat state-driven, yang berisiko menghilangkan otonomi ekonomi dan identitas organisasional koperasi (Sabila & Toruan, 2024). Dalam kerangka kelembagaan, ketergantungan tersebut menunjukkan kegagalan negara dalam menciptakan insentif yang mendorong kemandirian institusional koperasi.

Koperasi sebagai Arena Relasi Kekuasaan

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa koperasi berbasis negara berfungsi sebagai arena relasi kekuasaan antara elite birokrasi, pengurus koperasi, dan aktor politik lokal. Posisi strategis dalam struktur koperasi dimanfaatkan untuk mengakses sumber daya negara, memperluas jaringan politik, dan memperoleh legitimasi sosial. Dalam konteks ini, koperasi tidak berada dalam ruang institusional yang netral, melainkan terintegrasi dalam struktur kekuasaan lokal. Fenomena tersebut mencerminkan kecenderungan oligarkis dalam organisasi kolektif, di mana pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya dikuasai oleh segelintir aktor. Perspektif teori elite menjelaskan bahwa ketergantungan organisasi terhadap sumber daya eksternal membuka ruang bagi konsentrasi kekuasaan dan praktik elite capture (Li et al., 2023). Akibatnya, koperasi berpotensi kehilangan fungsi emansipatorisnya dan justru memperkuat struktur kekuasaan yang telah ada.

Paradoks dan Kegagalan Kelembagaan dalam Pembangunan Koperasi Berbasis Negara

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menegaskan adanya paradoks pembangunan koperasi berbasis negara. Di satu sisi, negara berupaya memperkuat koperasi melalui regulasi dan bantuan. Namun di sisi lain, intervensi tersebut justru melemahkan karakter koperasi sebagai organisasi otonom, partisipatif, dan berkelanjutan. Paradoks ini menunjukkan bahwa pendekatan *top-down* yang mengandalkan kapasitas negara tidak secara otomatis menghasilkan koperasi yang kuat secara kelembagaan. Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini mencerminkan kegagalan desain kebijakan yang terlalu menekankan aspek input dan kepatuhan administratif, tanpa memperhatikan dinamika kelembagaan dan relasi aktor di tingkat lokal (Hendra & Halbadika Fahlevi, 2024). Dengan demikian, kegagalan koperasi berbasis negara tidak dapat direduksi sebagai kegagalan implementasi semata, melainkan sebagai kegagalan model pembangunan koperasi itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterbatasan utama pembangunan koperasi berbasis negara terletak pada desain kelembagaan yang menempatkan negara sebagai aktor dominan. Konfigurasi tersebut menghasilkan koperasi yang berkembang secara administratif, tetapi lemah dalam otonomi, partisipasi anggota, dan keberlanjutan kelembagaan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan koperasi tidak cukup ditopang oleh regulasi dan bantuan negara, melainkan oleh keselarasan antara aturan formal, norma organisasi, dan insentif partisipasi anggota. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa koperasi perlu dipahami sebagai institusi sosial-politik yang rentan terhadap relasi kekuasaan, terutama ketika bergantung pada sumber daya negara. Oleh karena itu, penguatan koperasi mensyaratkan pergeseran peran negara dari pengendali utama menjadi fasilitator kelembagaan yang menciptakan ruang bagi kemandirian, demokrasi internal, dan akuntabilitas organisasi. Ke depan, kebijakan pembangunan koperasi perlu diarahkan pada pembentukan kerangka regulasi yang kontekstual dan membatasi intervensi direktif negara, sementara penelitian selanjutnya disarankan mengeksplorasi variasi model pembangunan koperasi untuk memperdalam pemahaman mengenai konfigurasi kelembagaan yang lebih berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Aprilis, A., & Zulkarnain, Z. (2025). PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DESA. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 9(5), 56–67.
- Chalim, M. A., Listyowati, P. R., Hanim, L., & Noorman, M. (2022). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan PP No.7 Tahun 2021. *Jurnal Penelitian Hukum Audi Et AP*, 1(1), 21–29.
- Farid, A. S. (2025). Wacana Kritis Media Online Terhadap Koperasi Merah Putih Sebagai Proyek Ekonomi Politik Pembangunan Desa. *Jurnal Syiar-Syiar*, 5(1), 60–65.
- Giawa, Y., & Sihotang, J. (2025). A Legal Analysis of the Establishment and Regulatory Framework of the Merah Putih Village Cooperative in Indonesia Under Law Number 25 of 1992 on Cooperatives. *The Future of Education Journal*, 4(8), Page. Retrieved from <https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index>
- Ginda. (2020). Optimalisasi Koperasi Sebagai Instrument Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 5(2), 40–68. Retrieved from www.bps.go.id,
- Hamid, S. Al. (2020). Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 54–68. <https://doi.org/10.37479/jkeb.v13i1.7107>
- Hayati, F. A. (2025). *Koperasi dan UMKM: Fondasi Ekonomi Kerakyatan di Era Digital* (Vol. 32). Cilacap, Indonesia: PT Media Pustaka Indo.
- Hendra, H., & Halbadika Fahlevi, A. (2024). Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District. *Iapa Proceedings Conference*, 187. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1052>
- Li, Y., Qin, X., Sullivan, A., Chi, G., Lu, Z., Pan, W., & Liu, Y. (2023). Collective action improves elite-driven governance in rural development within China. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 600. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02089-9>
- Nurfadilah, Yakub, A., & Nadir, S. (2024). Actor Relations in Determining Education City Area Policies in Majene Regency. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, 8(2), 2562–2571. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2>.
- Ojea, E., Lester, S. E., & Salgueiro-Otero, D. (2020). Adaptation of Fishing Communities to Climate-Driven Shifts in Target Species. *One Earth*, 2(6), 544–556. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.05.012>
- Ruslan, M. (2018). *Implikasi Kinerja Kelembagaan Koperasi*. Bogor, Indonesia: Azkiya Publishing.
- Sabila, S. V., & Toruan, V. G. L. (2024). Koperasi Dalam Perspektif Hukum Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Era Globalisasi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 309–315. Retrieved from <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/883>
- Septiana, H. (2025). Strategi Kebijakan dalam Mendukung Pengembangan UMKM di Kota Cilegon menjadi wirausaha mandiri berbagai bentuk pelatihan dan fasilitas telah diberikan seperti pada. *Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2(September), 201–221.
- Simorangkir, D. J., Sinaga, P., & Setyowati, R. K. (2025). Kewenangan dan Pengawasan Pemerintah dalam Regulasi Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(4), 677–692. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i4.6645>

- Suardi, M. (2025). *Akuntansi untuk Koperasi (Teori dan Aplikasinya)*. Sumatera Barat, Indonesia: CV Azka Pustaka.
- Sutiani, Harahap, M. A. K., & Damanik, S. E. (2025). Peran Perencanaan Partisipatif dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kawasan Permukiman Padat Penduduk. *J-CEKI Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(6), 2754–2764.
- Syafi'i, I., & Septiawati, S. T. (2025). Dampak Kebijakan Pemerintah dalam Mendirikan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Sukodadi, Lamongan. *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 17(2), 167–186.
- Wardanni, D., Mazmuria, Y., Fahira, F., & Amalia, D. (2025). MENAKAR POLA HUBUNGAN AKTOR INFORMAL DAN FORMAL: STUDI KASUS KERJASAMA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PANDEGLANG DAN YAYASAN. *Jurnal JISIPOL*, 9(3), 28–56.
- Yuhertiana, I., Zakaria, M., Suhartini, D., & Sukiswo, H. W. (2022). Cooperative Resilience during the Pandemic: Indonesia and Malaysia Evidence. *Sustainability*, 14(10), 5839. <https://doi.org/10.3390/su14105839>